

PENENTUAN INDIKATOR KUMUH KAWASAN KITUN KELURAHAN BARABAI DARAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Andi Achmad Priyadharma

Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fak. Teknik, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin
e-mail: andiachmadp@umbjm.ac.id

Sa'dianoor

Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fak. Teknik, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin
e-mail: sadianoorpwk@gmail.com

Amar Rizqi Afdholi

Dosen Prodi Arsitektur, Fak. Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional
Malang
e-mail: amarrizqi@lecturer.itn.ac.id

Kelurahan Barabai Darat adalah kelurahan terpadat di Kab. HST yang terletak di pusat Kota Barabai, Kawasan Kitun di kelurahan tersebut memiliki lokasi strategis dengan potensi sosial ekonomi dan budaya untuk dikembangkan. Masalah utama adalah jumlah penduduk yang mengakibatkan potensi kekumuhan meningkat. Tujuan penelitian ini untuk penentuan indikator kumuh Kawasan Kitun sebagai acuan penanganan kawasan kumuh. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Metode ini dipilih untuk menemukan indikator kumuh pada kawasan dengan langsung masuk ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan interaksi sosial secara langsung. Data lapangan didapatkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi eksisting kawasan dan indikator kumuh kawasan. Penilaian indikator kumuh berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan Kawasan Kitun memenuhi 7 (tujuh) indikator kumuh dan diperlukan penanganan peningkatan kualitas lingkungan. Penanganan kumuh dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan dan instrumen, seperti perencanaan terintegrasi berupa pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan serta pedoman pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Kata kunci : Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kumuh, Permukiman

ABSTRACT

Barabai Darat Village is the most densely populated urban village in Hulu Sungai Tengah Regency, strategically located in the center of Barabai City. One of its areas, Kitun, possesses significant social, economic, and cultural potential for further development. However, the high population density has contributed to an increasing

risk of slum conditions. This study aims to identify the slum indicators of the Kitun Area as a basis for formulating appropriate slum upgrading strategies. A qualitative research method was adopted, involving direct field observations, in-depth interviews, and documentation to examine the existing physical and socio-environmental conditions of the area. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to identify the characteristics and indicators of slum settlements. The findings reveal that the Kitun Area meets seven slum indicators based on field observations and interview results, indicating the need for environmental quality improvement. Slum upgrading is recommended through an integrated planning approach supported by sustainable financing mechanisms from the central government to local governments, as well as the implementation of guidelines for the prevention and improvement of slum settlements. These measures are expected to enhance the quality of the residential environment and promote sustainable, resilient, and livable urban settlements.

Keywords : Barabai, Hulu Sungai Tengah, Slum, Settlements

1. PENDAHULUAN

Permasalahan permukiman kumuh masih terus teridentifikasi pada skala perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, serta keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana permukiman menjadi faktor yang mendorong munculnya kawasan dengan kualitas lingkungan yang rendah. Dampak yang muncul tidak hanya mempengaruhi aspek fisik saja, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup. sehingga diperlukan perencanaan komprehensif dan berkelanjutan merupakan upaya penanganan yang paling efektif. Identifikasi terhadap indikator penyebab kekumuhan menjadi langkah awal yang penting sebagai dasar dalam menentukan perencanaan penataan yang tepat.

Kelurahan Barabai Darat Kab. HST merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Posisi yang strategis, kemudahan akses, serta kedekatannya dengan pusat perdagangan dan pelayanan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kawasan yang diminati masyarakat untuk bermukim. Selain dihuni oleh penduduk asli yang telah menetap secara turun temurun, Kelurahan Barabai Darat juga mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat arus migrasi dari berbagai daerah. Pondok Pesantren Nurul Muhibbien sebagai pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan di kelurahan ini menjadi daya tarik masyarakat untuk datang dan menetap. Aktivitas keagamaan yang rutin diselenggarakan juga memberikan kontribusi terhadap tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini.

Tingginya kepadatan penduduk dan kompleksitas aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, infrastruktur, dan pelayanan dasar permukiman. Apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan kawasan yang memadai, kondisi tersebut dapat memicu terbentuknya kawasan permukiman kumuh, salah satunya di Kawasan Kitun,

Kelurahan Barabai Darat. Permasalahan yang muncul meliputi penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketidaksesuaian kondisi permukiman dengan standar kelayakan huni.

Sejalan dengan upaya percepatan penanganan kawasan kumuh, pemerintah pusat melalui kementerian terkait meminta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyampaikan usulan penanganan kawasan kumuh di Kawasan Kitun, Kelurahan Barabai Darat. Usulan tersebut harus disusun berdasarkan indikator kekumuhan yang menjadi prioritas penanganan sehingga dapat memberikan dampak yang efektif terhadap penurunan tingkat kekumuhan kawasan. Kajian ini diperlukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi dan menentukan indikator kekumuhan yang paling berpengaruh di Kawasan Kitun sebagai dasar penyusunan strategi penanganan dan penataan kawasan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Permukiman Kumuh

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berlangsung secara cepat di suatu wilayah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, serta tingginya kepadatan penduduk. Kondisi kepadatan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya dukung kawasan dan memicu berbagai dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya arus urbanisasi (Kamalia dan Sari, 2021). Menurut Prayojana et al, (2020), urbanisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perkotaan, dari aspek fisik dan juga aspek non fisik. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan potensi terbentuknya permukiman kumuh apabila tidak diimbangi dengan upaya pemenuhan hunian dan infrastruktur yang sesuai standar kelayakan.

Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, kebutuhan hunian dan ketidaktersediaan infrastruktur serta pelayanan dasar adalah permasalahan perkotaan. Definisi kumuh menurut beberapa panduan penanganan kumuh seperti PLP2BK tahun 2012 menyebutkan bahwa kumuh merupakan lingkungan permukiman dengan kualitas fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang rendah, dengan kesesuaian lokasi pada rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten. Definisi permukiman kumuh lainnya disebutkan didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni dengan indikator ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana lingkungan yang tidak sesuai standar minimal.

Prajamandana et al. (2021) menyatakan bahwa kawasan kumuh sering dijumpai pada lokasi-lokasi strategis perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk secara cepat, seperti bantaran sungai, kawasan

pesisir, sempadan rel kereta api, maupun pusat-pusat aktivitas ekonomi. Atika & Ikaputra (2023), menambahkan bahwa permukiman kumuh yang berada di area perkotaan merujuk pada daerah padat penduduk pada kawasan perkotaan dengan kondisi bangunan hunian yang tidak memenuhi standar serta keterbatasan akses infrastruktur dasar perkotaan. Kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi cenderung memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan kawasan permukiman yang berkembang secara terencana Ramadani et al. (2025).

2.2. Indikator Permukiman Kumuh

Indikator permukiman kumuh berdasarkan peraturan menteri sebagaimana dimaksud adalah:

Tabel 1. Indikator Amatan

No	Indikator	Parameter
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan Kualitas permukaan jalan lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air Ketidaktersediaan drainase Kualitas konstruksi drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis Sarana prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018

Setiap indikator permukiman tersebut di atas memiliki fungsi masing-masing yang saling terkait dalam membentuk lingkungan/ kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Bangunan gedung berperan sebagai wadah utama bagi aktivitas hunian, sosial, maupun ekonomi masyarakat, sedangkan jalan lingkungan berfungsi sebagai prasarana yang menjamin aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarruang dalam kawasan permukiman. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar mampu

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan (Afdholy et.al, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dalam menemukan indikator kumuh pada kawasan dengan langsung masuk ke lokasi penelitian dan melakukan interaksi sosial secara langsung. Metode ini juga memungkinkan untuk menemukan masalah kawasan secara jelas dengan eksplorasi secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan kondisi pada Kawasan Kitun.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Penentuan Indikator Kumuh Kawasan Kitun Kelurahan Barabai Darat Kab.HST dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi, berupa pengamatan langsung oleh peneliti terhadap kondisi fisik pada Kawasan Kitun.
2. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi kondisi fisik dan non-fisik serta budaya pada Kawasan Kitun Kelurahan Barabai Darat. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan mengacu pada standar yang diterbitkan oleh Dirjen Perumahan No. 6 Tahun 2022. Edaran tersebut berisi tentang tata cara dan petunjuk teknis rencana pembangunan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman.
3. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting dan sebagai bukti sah, rujukan historis dan melihat detail kondisi kawasan.

Pengumpulan data primer dengan observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dengan pencatatan peraturan kebijakan terkait dan pedoman serta petunjuk teknis lainnya. Penggunaan kedua data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi eksisting kawasan penelitian serta mendukung proses analisis dalam menentukan indikator kekumuhan yang menjadi prioritas penanganan di Kawasan Kitun, Kelurahan Barabai Darat. Data ini dihimpun untuk menjawab tujuan penelitian sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi terhadap permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan untuk menemukan informasi dan data konkrit mengenai kondisi terbaru kawasan permukiman serta tingkat kekumuhan kawasan. Data primer yang dikumpulkan meliputi 7 (tujuh) indikator kumuh sesuai dengan peraturan dan surat edaran tersebut di atas, wawancara mendalam dilakukan untuk memastikan hasil observasi yang dilakukan peneliti sesuai dengan informasi warga pada kawasan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pencatatan dokumen dan instansi terkait sebagai pendukung analisis penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi, dokumen rencana tata ruang terkait yang tersedia, untuk melihat program

pemanfaatan ruang, rencana pola dan struktur ruang. Data sekunder lain yang dikumpulkan berupa program pembangunan pengembangan kawasan permukiman dalam wilayah kabupaten/kota. Data sekunder lain yang diambil adalah Profil Kawasan Kitun.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam Penentuan Indikator Kumuh Kawasan Kitun Kelurahan Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah deskriptif kualitatif dengan identifikasi dan analisis sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator, Parameter dan Persentase Kumuh

INDIKATOR	PARAMETER	PERSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2. Kondisi Jalan Lingkungan	Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun
	b. Ketidaktersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

INDIKATOR	PARAMETER	PERSENTASE
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018

3.3 Lokasi Studi

Pemilihan Kawasan Kitun sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai kawasan permukiman kumuh yang merupakan prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kawasan ini telah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh program peningkatan kualitas permukiman sebagai bagian dari upaya penataan kawasan kumuh. Selain memiliki karakteristik permukiman padat, Kawasan Kitun juga berada pada wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup pesat. Oleh karena itu, penelitian pada kawasan ini diharapkan dapat menghasilkan identifikasi indikator kekumuhan yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas penanganan kawasan secara

lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.



Gambar. 1 Objek Lokasi Penelitian
Sumber: DISPERKIM KAB. HST

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi lapangan menunjukkan Kawasan Kitun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, lokasi strategis dengan potensi pengembangan pada aspek non-fisik. Masalah utama adalah jumlah penduduk yang mengakibatkan potensi kekumuhan meningkat. Mengacu pada indikator kumuh dalam peraturan terkait, penilaian dilakukan berdasarkan tujuh indikator utama. Tabel di bawah menunjukkan Kawasan Kitun Kelurahan Barabai Darat masuk ke dalam kategori kawasan kumuh.

Tabel 2. Indikator Kumuh Kawasan Kitun

Parameter	%	Bobot	Numerik	Sat	
1. Ketidakteraturan Bangunan	75%	3	1.278	Unit	KONDISI BANGUNAN GEDUNG
2. Kepadatan Bangunan Tdk Sesuai Ketentuan	0%	-	-	Ha	
3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	5%	-	93	Unit	
4. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	11%	-	2.307	Meter	KONDISI JALAN LINGKUNGAN
5. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	41%	1	8.622	Meter	
6. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	41%	1	711	KK	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM
7. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2%	-	37	KK	
8. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	40%	1	17	Ha	KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
9. Ketidaktersediaan Drainase	64%	3	5.931	Meter	
10. Kualitas Konstruksi Drainase	18%	-	1.670	Meter	KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	6%	-	111	KK	
12. Saprass Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	91%	5	1.582	KK	KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
13. Saprass Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	87%	5	1.501	KK	
14. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	9%	-	163	KK	KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
15. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0%	-	-	Unit	
16. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0%	-	-	Unit	

Sumber: DISPERKIM HST, 2025

Indikator bangunan gedung menunjukkan arah bangunan yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan standar teknis. Pada gambar di bawah, terlihat kondisi rumah warga sebagian besar masih berupa konstruksi non permanen dan tidak memenuhi persyaratan teknis. Posisi rumah tidak beraturan bagian depannya, beberapa menghadap ke arah bagian belakang rumah lain sehingga tidak terdapat akses langsung menuju jalan lingkungan.



Gambar. 2 Kondisi Rumah

Sumber: Dok. pribadi, 2025

Pada indikator air minum teridentifikasi kurangnya akses air minum individu dan pemenuhan terhadap kebutuhan air minum individu. Warga memenuhi kebutuhannya sebagian besar dengan membeli secara eceran. Kondisi jalan lingkungan dalam hal cakupan dan kualitas permukaan belum menunjukkan angka maksimal. Pada gambar 3 terlihat kondisi permukaan jalan lingkungan berupa *paving block*. Pada bagian lain kawasan masih terdapat jalan lingkungan tanpa perkerasan. Kondisi drainase lingkungan belum maksimal dalam mengalirkan limpasan air, ketersediaan salurannya dan kualitas konstruksinya. Dapat dilihat pada gambar 4 di bawah drainase lingkungan yang tidak maksimal mengalirkan air limpasan, sementara pada sisi lain kawasan terdapat saluran drainase yang tidak optimal dalam menampung air limpasan.



Gambar. 3 Jalan Lingkungan Kawasan
Sumber: Dok. pribadi, 2025



Gambar. 4 Drainase Lingkungan Kawasan
Sumber: Dok. pribadi, 2025

Indikator pengelolaan air limbah terlihat pada gambar 5 di bawah, sebagian besar rumah tidak terdapat septiktank, sehingga air limbah langsung jatuh ke permukaan tanah. Bentuk lain dari pengelolaan limbah domestik berupa pemasangan buis beton dengan diameter variatif antara 80 centimeter sampai 1,00 meter ditanam pada kedalaman 50 centimeter sampai maksimal 1,00 meter dan sebagian tanpa tutup dan tanpa lubang hawa.



Gambar. 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sumber: Dok. pribadi, 2025

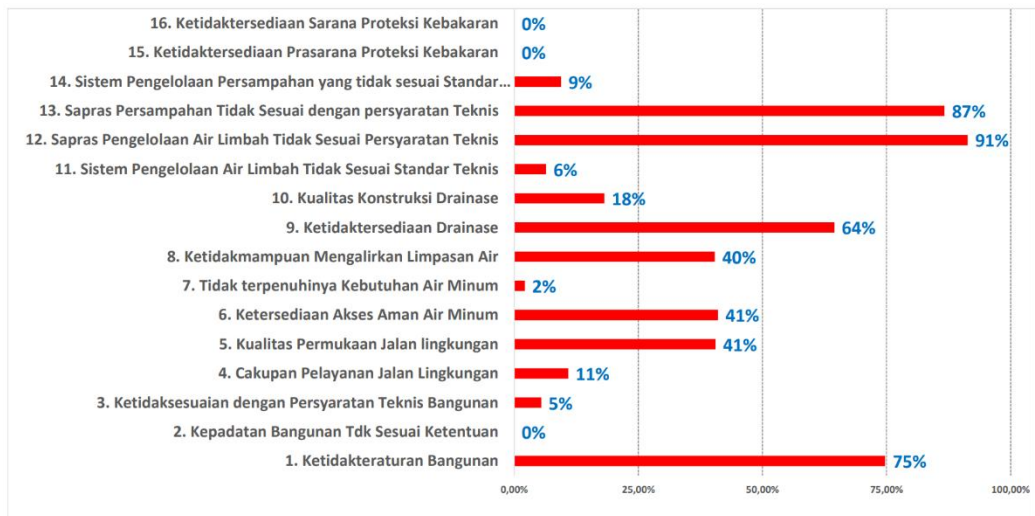
Kondisi pengelolaan persampahan pada kawasan penelitian menunjukkan ketersediaan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar teknis. Hasil observasi pada gambar 6 di bawah menunjukkan bahwa tidak ada sistem pengelolaan terintegrasi. Sampah dibuang secara mandiri ke TPS Sementara yang ada dengan kondisi yang kurang baik dan tidak mampu menampung semua sampah.



Gambar. 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan
Sumber: Dok. pribadi, 2025

Kondisi proteksi kebakaran belum tersedia sama sekali pada kawasan tersebut. Hasil observasi menunjukkan sebagian besar konstruksi pada kawasan penelitian berupa bangunan non permanen dan beresiko tinggi terhadap kebakaran.

Grafik 1. Persentase Indikator Kumuh Kawasan Kitun



Sumber: DISPERKIM KAB. HST, 2025

Grafik di atas menunjukkan kondisi pengelolaan air limbah memiliki nilai persentase terbesar yaitu 91%. Kondisi pengelolaan persampahan memiliki nilai persentase 87% dan kondisi bangunan gedung sebesar 75%. Kondisi drainase lingkungan sebesar 64%. Kondisi penyediaan air minum sebesar 41%. Kondisi jalan lingkungan sebesar 41% dan kondisi proteksi kebakaran sebesar 0%. Penilaian indikator kumuh berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan Kawasan Kitun memenuhi 7 (tujuh) indikator kumuh dan diperlukan penanganan peningkatan kualitas lingkungan. Program penanganan kumuh dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan dan instrumen, seperti perencanaan terintegrasi berupa pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan serta penyusunan pedoman pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

5. KESIMPULAN

Penentuan indikator kumuh berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan Kawasan Kitun memenuhi 7 (tujuh) indikator kumuh dan diperlukan penanganan peningkatan kualitas lingkungan. Program penanganan kumuh dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan dan

instrumen, seperti perencanaan terintegrasi berupa pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan serta pedoman pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan dengan melakukan simulasi peningkatan kumuh pada kawasan ini agar selanjutnya dapat ditentukan bentuk peningkatan yang paling tepat untuk diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdholy, A. R., Winarni, S., & Widyarthara, A. (2025). Analisa Karakteristik Infrastruktur Permukiman Bantaran Sungai Brantas di Kelurahan Samaan Kota Malang. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 9(02), 265-278.
- Atika, F. A., & Ikaputra, I. (2023). Permukiman Kumuh Ditinjau Dari Kontinum Formal Dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara). *Media Komunikasi Geografi*, 24(2), 168-188.
- Data Isian Dan Parameter Kekumuhan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2024
- Kamalia, A., & Sari, S. R. (2021). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Kudus Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(3), 245-253.
- Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan 2012 (PLP2BK), Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018
- Profil Kawasan Kitun Kelurahan Barabai Darat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2024
- Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak urbanisasi terhadap permukiman kumuh (slum area). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 60-69.
- Ramadani, A. A., Koesoemawati, D. J., & Revana, D. Q. Identifikasi tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman nelayan di Kecamatan Puger. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(2), 480-501.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman